



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 10%

Date: Friday, May 11, 2018

Statistics: 614 words Plagiarized / 6266 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Revitalisasi Nasionalisme Daerah Menuju Keutuhan Nasionalisme **Negara Kesatuan Republik Indonesia** (NKRI) Zulham Lecturer-Universitas Malikussaleh-Aceh
zulhambere@gmail.com Abstract **This paper discusses the** models and challenges of Indonesian nationalism. Initial hypothesis, in addition to sovereignty, nationalism of citizenship, ethno-nationalism is also important from as comprehensive study.

Because ethno-nationalism has become the challenge of most modern countries and especially the current multi ethnic and civilian nationalism. Ethno-nationalism is regarded as a latent dangerous threat as well as an unforeseen challenge to modern countries, especially Indonesia as an archipelagic country and encompassing various ethnic areas.

The **objective of this paper is to** study the ethno-nationalism of the regional archipelago, beginning with the importance of the conceptual framework, the concept of the former nation and the depiction of nationalism. The study of the state, including the origin, concept and definition of nationalism. The next objective is **this paper is to** analyze what actions should be taken by the State of Indonesia in order to address regional ethno-nationalism so that ethno-nationalism is transformed into the nationalist nationalism of the Indonesia Raya. The theory used in this paper is ethno-nationalism, nationalism, sovereignty.

While the method used is the analysis of content with book instruments. The subjects studied are regional ethno-nationalism and Indonesian nationalism. The data is analyzed with descriptive method. The results of the study as follows: in the case of Indonesia, ethno-nationalism has a tendency and also orientation for freedom from the existing state by reconsidering it as pre-colonial sovereignty, emphasizing that it is language,

culture, religion and history. Keywords: Revitalization, transformation, ethno-nationalism and nationalism.

Abstrak Makalah ini membahas model dan tantangan nasionalisme Indonesia. Hipotesa awal, selain kedaulatan, nasionalisme kewarganegaraan, etno-nasionalisme juga tidak terlepas dari kajian yang komprehensif. Karena etno-nasionalisme telah menjadi tantangan sebagian besar negara modern dan terutama multi etnis dan nasionalisme sipil yang ada sekarang. Etno-nasionalisme dianggap sebagai ancaman berbahaya laten dan juga tantangan yang tak terduga bagi negara-negara modern, khususnya **Indonesia sebagai negara kepulauan** dan mencakup berbagai wilayah etnis.

Tujuan atau objektif makalah ini adalah untuk mengkaji etno-nasionalisme kedaerahan nusantara, dimulai dengan pentingnya kerangka konseptual, konsep bangsa terdahulu serta menggambarkan nasionalisme. Kajian negara, mencakup asal usul, konsep dan definisi nasionalisme. Objektif selanjutnya adalah makalah ini menganalisa tindakan apa sebaiknya yang diambil oleh Negara Indonesia untuk menyikapi etno-nasionalisme daerah sehingga etnis nasionalisme tertransformasi kepada nasionalisme Indonesia Raya. Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah etno nasionalisme, nasionalisme, kedaulatan.

Sedangkan **metode yang dipakai adalah** analisis kandungan (content analysis) dengan instrumen referensi buku. Subjek yang dikaji adalah etnonasionalisme daerah dan nasionalisme Indonesia. Sedangkan data dianalisis secara deskriptif dengan hasil kajian sebagai berikut: dalam kasus Indonesia, etno-nasionalisme memiliki kecenderungan dan juga orientasi untuk kebebasan dari negara yang ada dengan mempertimbangkannya kembali sebagai kedaulatan pra-kolonial, yang menekankan bahwa itu adalah bahasa, budaya, agama dan sejarah.

Key word: Revitalisasi, transformasi, etno-nasionalisme dan nasionalisme
Pendahuluan
Pasca perang dunia kedua, gerakan pembebasan nasional merupakan sebuah bentuk baru nasionalisme mengguncang fondasi imperialisme dan menghasilkan percepatan proses dekolonisasi. Sebagian besar negara-negara **Asia, Afrika dan Amerika Latin** membuang imperialisme, dan nasionalisme yang didasarkan pada demokrasi, kemauan rakyat, kebebasan dan keadilan dihasilkan karena lebih dari 100 negara bangsa baru ada (Egyankosh: 32).

Dengan kata lain, di Asia Timur, nasionalisme telah berhasil melewati abad ke-20 dan telah menjadi retorika bukan hanya perjuangan anti-imperialis tapi juga seruan untuk memberdayakan dan mendemokratisasi negara dari dalam (Calhoun, 1993: 213-14). Kebanyakan sumber utama nasionalisme Asia adalah perlawanan individu terhadap

perubahan pola kebiasaan.

Ketahanan ini diperkuat dengan merasakan bahwa kegigihan kelompok bergantung pada ketekunannya yaitu budaya, yang harus dilindungi dengan biaya apapun (Spykman, 1926: 407). Sebaliknya, saat memprotes peraturan Barat, nasionalis Asia sering memberi penghormatan kepada Barat dengan alasan negara mereka mengadopsi institusi politik Barat (Braisted, 1954: 360).

Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara di Afrika dan Asia untuk menciptakan negara-negara kesatuan dari populasi etnis yang sangat heterogen belum menemukankesuksesan yang besar sampai sekarang. Perlu mengingat kembali perpecahan dan konflik di negara-negara baru seperti Indonesia, Nyanmar, Srilanka, Irak, Somalia dan Angola, dan kegagalan relatif mereka untuk menghasilkan sebuah komitmen populer yang mengesampingkan 'negara' kewarganegaraan dan kewarganegaraan berdasarkan pada posisi batas kolonial Negara (Smith, 1996: 448).

Kegagalan ini menyebabkan munculnya etno-nasionalis, yang berarti tinggal di wilayah yang ditentukan dan ingin berpisah dari negara, karena merasakan memiliki sejarah seseorang yang mandiri atas dasar suku. Seperti Aceh sejauh ini adalah contoh Indonesia yang sesuai. Selain konflik etno-nasionalisme, ada empat kategori konflik, seperti persaingan komunal, yang merujuk secara langsung tersebar melalui wilayah tersebut dalam masyarakat majemuk, dan persaingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mendapatkan bagian kekuasaan politik.

Misalnya konflik antara Muslim dan Kristen di Ambon atau Poso; Konflik kelas etno yang mengacu pada kehidupan yang tersebar melalui wilayah dalam masyarakat majemuk, dan menginginkan partisipasi yang lebih besar di negara untuk mencapai persamaan hak dan kesempatan untuk mengatasi dampak diskriminasi akibat status imigran dan minoritas mereka.

Contohnya adalah bahasa Tionghoa Indonesia; Penduduk asli ingin tinggal di wilayah yang ditentukan dan menginginkan otonomi lebih besar dari negara yang mengaturnya, terutama terkait untuk melindungi tanah tradisional, sumber daya, dan budaya mereka. Aceh, orang Dayak di Kalimantan dan juga orang Papua adalah contoh nyata dari konflik ini; Yang terakhir adalah sekte militan (agama) yang mengacu pada kelompok kecil yang biasanya hanya memperjuangkan ideologi religius (Klinken, 2003: 112-13). Pada akhir abad kesembilan belas, sebagian besar penduduk dunia hidup di bawah pemerintahan kolonial.

Namun, pada pertengahan abad ke-20, kebanyakan koloni telah mencapai atau sedang

dalam proses mencapai kemerdekaan (Chandra, 1999: 11). Dalam formasi negara, gagasan negara, ketertarikan adalah ciri khas identitas politik. Minat dapat dimanifestasikan sebagai 'kepentingan pribadi' (diri sendiri dan kelompok keluarga terdekat); 'Kepentingan bersama' (bersama dengan kelompok yang lebih luas); 'Kepentingan pribadi yang muncul' (dari diri sendiri melalui membantu mengamankan nasib orang lain); Dan 'altruisme' (terutama untuk keuntungan orang lain).

(Kingsbury, 2002: 69). Sebagian besar negara memiliki hak hukum yang diberikan oleh konstitusi mereka mengenai kepentingan masing-masing batas negara. Negara-negara bangsa mencoba melakukan diplomasi koersif sementara diplomasi lunak tidak menjanjikan solusi atau sebelum mengumumkan perang dengan negara-negara lain untuk menegaskan bahwa ini adalah batas-batas nasional.

Dunia terbagi dalam beberapa negara, di mana kemudian negara-negara ini didorong untuk menekankan wilayah nasional masing-masing serta kedaulatan nasional secara paksa. Tidak terlepas, negara bagian yang juga secara intensif menciptakan penindasan atas wilayahnya yaitu bagian daerah dalam rangka menumbuhkan negara dan pendekatan terhadap tatanan kedaulatan nasional.

Namun pendekatan negara ini cenderung mengabaikan dan mengecualikan adanya hak sipil kepada partai-partai dari kebijakan pengambilan keputusan, yang mengakibatkan hanya representasi kepentingan elitis dan pribadi, bukan mewakili negara-negara besar (He & Reid, 2004: 297). Sebagian besar negara yang dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan wilayah adalah wilayah yang sangat luas dan multi etnis, yang saling bergantung secara keseluruhan. Masalah ini juga dihadapi secara intensif oleh Indonesia, terutama dalam pengembangannya adalah nasionalisme negara (Drake, 1992: 296).

Sebelum Indonesia merdeka, nasionalisme pun diperdebatkan dan ditekankan "bumiputra" dan "pribumi". Istilah "bumiputra" dan pribumi "digunakan untuk membedakan penduduk asli dari penduduk asli penduduk kolonial. Istilah ini mulai populer selama tahun 1920 dan 1930an di Malaysia dan juga di Indonesia. Bumiputra dan pribumi keduanya berasal dari kata-kata Sanskerta.

"Bumi" yang memiliki definisi tanah atau tanah dan "putra" bisa dipahami sebagai pangeran, atau lebih dipahami sebagai "anak". Pribumi sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa, yang berarti pribumi pribumi. Dengan demikian, konsep ini sebelumnya digunakan untuk membedakan antara penduduk asli dan penduduk asli (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 662-3).

Selain keberadaan bumiputra dan pribumi, proses pencapaian persatuan nasional Indonesia adalah beberapa hal yang unik, selama enam dekade pertama, umumnya berlangsung dalam perpaduan multi etnis dan integrasi teritorial. Kebutuhan ekonomi seperti pajak, perbendaharaan, batas adat dan wilayah telah dibentuk oleh penjajah Belanda. Sebaliknya, Belanda, saat merumuskan penyatuan nasional, menyangkal nilai-nilai etnis tertentu.

Rasa permusuhan yang dilakukan oleh Belanda di antara orang Indonesia, bukannya memasukkan komponen prinsip multi etnis, budaya nasional dan bahasa nasional (Lane, 2002). Penelitian Terkait/Studi Pustaka Asal-usul bangsa berasal dari konsep bangsa Barat, pada abad ke-18 orang-orang kelas menengah **di Eropa Barat dan** Amerika Utara semakin mengenal dengan perasaan bahwa "bangsa" itu milik mereka.

Dua ilustrasi tertua tentang kesadaran nasional modern adalah bahasa Prancis dan bahasa Inggris (Knight, 1982: 518-519). Menurut Ernest Renan bahwa sebuah bangsa adalah "jiwa, prinsip spritual" dan bahwa dia melanjutkan keberadaan sebuah bangsa adalah hasil dari "plebisit harian" (dalam Savich: 2).

Istilah bangsa dapat dipahami sebagai apa yang dijelaskan oleh Ernest Barker "sekumpulan manusia, yang mendiami wilayah yang pasti, yang biasanya diambil dari ras yang berbeda, namun memiliki kesiapan berfikir dan perasaan yang sama yang diperoleh dan digunakan selama perjalanan Sejarah umum .." (Egyankosh: 31). Anderson berpendapat bahwa sebuah bangsa adalah **komunitas yang dibayangkan karena** tidak mungkin semua anggota saling berhubungan langsung dengan sesama anggota setiap saat.

Oleh karena itu, anggotanya hanya bisa memandang bangsa secara keseluruhan dengan mengacu pada imajetersebut yang mereka temukan dalam pikiran mereka sendiri (Tamir, 1995: 421). Peter Alter mengatakan bahwa nasionalisme adalah "salah satu pemikiran yang paling ambigu di masa depan, terutama dalam konsep politik dan analisis leksikon. Setelah mendefinisikan dua jenis utama nasionalisme: nasionalisme Risorgimento yang berarti kebangkitan orang Italia yang berlaku bagi negara-negara yang berusaha membangun sebuah negara. Seperti Yunani, Italia, Jerman, Polandia, Serbia dimana menerapkan nasionalisme ini di abad ke-19.

Kedua, nasionalisme integral, juga dikenal sebagai "radikal", "ekstrem", sayap kanan, reaksioner, agresif-ekspansionis, derivatif, nasionalisme militan. Nasionalisme integral mulai ada setelah sebuah negara telah mencapai kemerdekaan dan telah membentuk sebuah negara, seperti Nazi Jerman dan Fasis Italia (Savich: 5). Nasionalisme sebagai ideologi politik modern hanya ada setelah mengikuti **revolusi Prancis tahun 1789** dan

berkembang selama abad ke-19.

Nasionalisme yang diraihny adalah tinggi pada saat Perang Dunia I. Nasionalisme bergantung pada fantasi kelompok atau "komunitas imajiner" dan produk industrialisasi, kapitalisme, dan modernisasi. Industrialisasi dan nasionalisme berkembang dan berkembang dalam hubungan simbiosis, masing-masing saling menegakkan (Savich: 1-2).

Meskipun demikian, istilah "nasionalisme" memiliki berbagai makna, namun secara sentral terdiri dari dua karakteristik: Pertama, sikap yang dimiliki oleh anggota sebuah bangsa ketika mereka peduli dengan identitas mereka sebagai anggota negara tersebut; Kedua, tindakan yang diambil oleh anggota sebuah negara untuk berusaha mencapai (atau mempertahankan) beberapa bentuk kedaulatan politik (Plato, 2001: 2).

AD Smith menawarkan definisi nasionalisme yang lebih merangkul sebagai gerakan ideologis, untuk pencapaian dan pemeliharaan pemerintahan sendiri atas nama sebuah kelompok, beberapa di antaranya anggotanya menganggapnya sebagai sebuah 'bangsa' aktual atau potensial seperti yang lain (dalam Smith, 2000: 492). Shafer dan Kedouri akan setuju bahwa nasionalisme melibatkan mitos yang berhubungan dengan dan mendorong perasaan kesetiaan terhadap dan identifikasi dengan kesadaran kelompok tentang dirinya sendiri dan menyebabkan kelompok tersebut memiliki atau menginginkan kemerdekaan politik di bawahnya adalah pemerintahan sendiri dan merupakan wilayahnya sendiri. Mereka pasti juga setuju bahwa nasionalisme secara keseluruhan adalah kompleks gagasan, sikap, peristiwa, dan gerakan politik.

Nasionalisme tentu sebuah ide, tapi juga merupakan kekuatan (Knight, 1982: 521). Thomas Hobbes (1588-1679) menjelaskan kedaulatan sebagai monopoli kekuatan pemaksaan dan menganjurkan agar hal itu dilakukan di tangan peraturan tunggal yang tidak dapat dilawan (Heywood, 2000: 38). Kedaulatan, di dalamnya adalah pengertian yang paling sederhana, adalah prinsip kekuatan absolut dan tak terbatas.

Setelah kemunculan negara modern, istilah kedaulatan telah diperbesar dan diklasifikasikan. Ada banyak jenis kedaulatan, semacam kedaulatan hukum yang menunjukkan otoritas hukum tertinggi yang berarti hak yang tidak dapat dipungkiri untuk menuntut kepatuhan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang; Kedaulatan politik menunjukkan kekuatan politik yang tidak terbatas, yaitu dengan menggunakan kekuatan koersif monopoli untuk menegakkan ketaatan; Kedaulatan internal berarti bahwa kekuasaan atau wewenang tertinggi di negara yang berada di badan hukum yang membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat semua warga negara, kelompok, subkelompok dan institusi di dalam batas wilayah negara; Dan

kedaulatan eksternal berkaitan dengan posisi negara di masyarakat internasional dan kapasitas untuk bertindak sebagai entitas independen dan otonom (Heywood, 2007: 131).

Berdasarkan Narasi di atas, penulis membahas model dan tantangan nasionalisme Indonesia. Selain kedaulatan, nasionalisme kewarganegaraan, etno-nasionalisme juga sangat urgent untuk dikaji secara komprehensif. Karena etno-nasionalisme telah menjadi tantangan sebagian besar negara modern dan terutama multi etnis dan nasionalisme sipil yang ada sekarang. Etno-nasionalisme dianggap sebagai ancaman berbahaya laten dan juga tantangan yang tak terduga bagi negara-negara modern, khususnya **Indonesia sebagai negara kepulauan** dan mencakup berbagai wilayah etnis.

Tujuan paper ini adalah untuk mengkaji etno-nasionalisme kedaerahan nusantara, dimulai dengan pentingnya kerangka konseptual, konsep bangsa terdahulu serta menggambarkan nasionalisme. Kajian negara, mencakup asal usul, konsep dan definisi nasionalisme. Tujuan selanjutnya adalah tulisan ini menganalisis sikap apa idealnya yang diambil oleh Negara Indonesia untuk mengakomodir etnis-nasionalisme daerah sehingga etnis nasionalisme tertransformasi ke pada nasionalisme Indonesia Raya. Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah etno nasionalisme, nasionalisme, kedaulatan.

Sedangkan pendekatan yang dipakai ialah review of literature, dengan metode analisis kandungan (content analysis) dan instrumen book coding yang dipakai untuk penguatan referensi. Hasil dan Pembahasan Civic Nasionalisme Secara global telah terjadi kebangkitan nasionalisme etnik sejak tahun 1960an, seringkali dalam bentuk gerakan etnis minoritas melawan negara-negara yang ada (Brown, 2004: 4).

Di negara modern, pecahnya negara multi etnis di Balkan seperti Yugoslavia dan kemunduran **Uni Soviet pada tahun 1991** menyebabkan eksistensi kembali dan bangkitnya nasionalisme (Savich: 1). Banyak ilmuwan politik mengamati keadaan ini menurun seiring kembalinya nasionalisme serta kelahiran kembali nasionalisme. **Hal ini sangat terkait dengan** etno-nasionalisme.

Penurunan ini memberi efek pada negara-negara dunia ketiga lainnya, terutama Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia juga. Di mana kedua negara ini mempertanyakan kembali, ini adalah eksistensi etnis minoritas daripada etnis mayoritas dominan. Persamaan anggota kelompok minoritas sering dirugikan dalam kaitannya dengan budaya etnis yang dominan karena mereka harus bergantung pada mereka yang memiliki bahasa dan budaya **yang sama untuk menjalankan** urusan sehari-hari.

Karena kebebasan untuk melakukan kehidupan sehari-hari seseorang pada dasarnya baik dan sulit untuk mengganti atau melepaskan ketergantungan pada budaya minoritas seseorang/etnis untuk mencapai kebaikan itu, ketergantungan ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan tertentu dan jika tindakan khusus tidak dilakukan seimbang seimbang (Plato, 2001: 19). Dalam beberapa dekade terakhir terjadi ketegangan besar antara nasionalisme kewarganegaraan dan etno-nasionalisme yang mengakibatkan adanya multikulturalisme, yang menekankan bahwa bangsa ini diliputi oleh masyarakat multi-etnis dan juga negara menjamin status setara mereka (Brown, 2001: 2).

Politik etnis dan nasionalisme bisa berarti dampak politik terhadap etnisitas dan identitas nasional. Hal ini pada gilirannya dapat menandakan penggunaan etnis dan nasionalisme dalam perebutan kekuasaan para pemimpin dan partai, yang mengarah ke analisis mikro politik etnik: atau proses dimana negara menciptakan kelompok dan negara etnis dan konflik mereka, menghasilkan analisis makro Formasi nasional (Smith, 1996: 445-46).

Etnis-nasionalisme mengacu pada nasionalisme yang didasarkan pada keunikan manusia, dan oleh karena itu, menyiratkan bentuk kewarganegaraan eksklusif berdasarkan anggota yang memiliki identitas etnis yang sama (Bertrand, 2002: 3-4). Etno-nasionalisme dapat juga disebut sebagai nasionalisme budaya yang menekankan bangsa sebagai masyarakat (etno) kesamaan budaya (Brown, 2001: 2).

Ras dan etnis menjadi dominan hanya dengan munculnya nasionalisme modern. Misalnya, Kekaisaran Ottoman adalah kerajaan multi-rasial multi-etnis yang hanya memiliki perbedaan agama, Muslim, Kristen, atau Yahudi. Nasionalisme mengubah ini (Savich: 11). Nasionalisme etnik lebih mengacu pada masa lalu, ke alam leluhur dan (melalui sejarah bersama).

Dalam komunitas seperti itu, karena menuntut keturunan bersama, dan kewarganegaraan tertutup hanya diakuisisi oleh darah dan 'ritus' kelahiran sesuai dengan hukum 'ius sanguinis' (Lawfield, 2009: 5). Menurut primordialis dan perennialist, etnisitas cenderung berasumsi bahwa etnik primordial, memberi kondisi manusiawi, dan bahwa negara-negara itu historis namun purbakala.

Negara, partai, birokrasi dan politik sebagian besar dianggap sebagai ekspresi publik dari perbedaan etnis dan identitas budaya yang sudah ada sebelumnya (Smith, 1996: 446). Dalam teori konflik etnis, kriteria etnis adalah sumber pertengkaran yang menonjol di antara masyarakat. Hubungan historis dan linguistik yang khas dianggap sebagai titik referensi utama bagi individu.

Ketika pola hubungan sosial antara kedua kelompok etika sedemikian rupa sehingga ketegangan sosial dan hasil konflik, tuntutan untuk memperluas pengaruh kelompok etnis yang dihasilkan (Hah & Martin, 1975: 374). Konflik Israel-Palestina dengan jelas menunjukkan bahwa wilayah bersama dan kenangan sejarah yang umum dapat menjadi pemecah belah dan bukan pemersatu.

Tinggal bersama di wilayah yang sama dan di bawah pemerintahan yang sama, atau bahkan berbagi sistem ekonomi dan hukum, mungkin gagal memadukan beragam komunitas menjadi satu negara, sebagaimana dibuktikan oleh realitas politik di Kanada, Belgia, bekas Yugoslavia, dan Cekoslowakia (Tamir, 1995: 424-25). Dalam konteks nasionalisme, premis dasar teori konflik adalah bahwa persaingan antar kelompok menimbulkan tuntutan untuk mengendalikan sistem distributif (Hah & Martin, 1975: 369).

Demikian pula halnya kasus di Indonesia, seperti Aceh, di mana budaya dan etnis khas Aceh, dan juga bahasa, telah menekankan kembali bahwa ini adalah wilayah pra-kolonial sebelum diintegrasikan ke dalam kedaulatan Indonesia dan pada saat bersamaan melawan nasionalisme nasional Indonesia. Dengan demikian, gerakan etno-nasionalis merupakan tantangan berat bagi demokrasi.

Kelompok-kelompok yang dimobilisasi di sepanjang garis etnik mengikuti sebuah negara dan merupakan institusi politik. Mereka berharap untuk mengenali batas-batas dan membuat sebuah negara baru di mana mereka mewakili mayoritas (Bertrand, 2002:2). Nasionalisme Sekuler Civic Indonesia Pada tahun 1945, Indonesia menjadi negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda, kemudian dihadapkan dengan masalah persatuan.

Rekonstruksi integrasi nasional dan infrastruktur ekonomi menjadi sasaran utama saat itu (Drake, 1992: 297). Nasionalisme membuktikan keberadaan orang **dan menyatakan bahwa mereka** berhak mengambil alih sebuah organisasi negara lama atau membangun yang baru. Gerakan nasionalis mencoba melakukan ini atas nama orang-orang yang terdokumentasi.

Biasanya, para pemimpin gerakan semacam itu berasal dari pusat atau lebih tepatnya, wilayah perkotaan yang luas dari negara yang dipertimbangkan (McIntyre: 75). Sama halnya seperti Indonesia, yang terutama meliputi negara kepulauan, di mana bapak pendiri gerakan nasionalis berasal dari Center Jakarta. Di negara yang berbeda secara geografis dan etnis seperti Indonesia, proses hubungan regional seringkali mengharuskan penahanan sejarah dan tradisi penduduk lokal yang mendukung warisan

yang lebih besar (Hoey, 2003: 110).

Berdasarkan keanekaragaman geografis ini, Sukarno menggunakan konsep 'Indonesia Raya' sebagai konsep nasionalisme Indonesia, yang ditujukan untuk perumusan masyarakat Indonesia (McIntyre, 1973: 75). Permasalahannya, setelah kemerdekaan, Indonesia ditantang oleh gerakan Darul Islam (House of Islam), yang mendukung nasionalisme Islam dan bukan nasionalisme sipil.

Beberapa organisasi semacam itu terikat untuk membentuk **antara Islam dan nasionalisme** Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada norma etnologi dan adat mereka, dan terlebih lagi Indonesia terbagi oleh sejumlah besar pulau terpencil dan terpisah, maka penyatuan koersif dan integrasi koersif merupakan instrumen penting yang dapat digunakan untuk menghadapi keragaman tersebut (Vandenbosch, 1952: 182) Nasionalisme Indonesia digunakan untuk mendukung dan mempromosikan rasa homogenitas dan identitas pribumi yang dengan kuat menolak dan mengecualikan partisipasi masyarakat imigran non pribumi (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 667).

Apalagi nasionalisme Indonesia secara ideologis dimanifestasikan dalam Pancasila, lima prinsip negara: kepercayaan kepada Tuhan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini dipostulasikan sebagai nilai bersama yang mendukung masyarakat toleran sekuler, majemuk, dan religius (Weatherbee, 2002: 23). Pemerintah menganggap etnis sebagai masalah sensitif, kemungkinan ancaman terhadap persatuan nasional dan bahkan tidak mengumpulkan statistik tentang kelompok etnis dalam sensus (Suryadinata dalam Turnet, 2005: 189).

Tidak individu yang dapat menuntut hak individu untuk dirinya sendiri atau meminta pembagian kekuasaan ke dalam sub masyarakat, tidak ada konflik yang diizinkan untuk terjadi (Kreuzer, 2004: 19). Setelah Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 setelah kolonialisme, nasionalisme, dan revolusi, elite di antara berbagai kelompok, agama, dan ras bertekad untuk membentuk identitas nasional yang baru dan, dengan demikian, menundukkan kesadaran politik mereka yang terpisah. (Wanandi, 2002: 136).

Umumnya gerakan separatis regional muncul karena ketidakpuasan pemerintah regionalisme ketika pemerintah Indonesia diubah dari sistem federal menjadi sistem kesatuan pada bulan Agustus 1950, yang menyebabkan ketidakpuasan provinsi dengan melakukan pemberontakan terbuka kepada pemerintah pusat. Negara-negara regional merasa kurang berkuasa di pemerintahan lokal setelah konversi ini (Vandenbosch, 1952: 184). Sebagian besar analis politik berpendapat bahwa faktor utama perselisihan nasionalisme Indonesia yang didukung oleh nasionalis sekuler Indonesia adalah perberlakuan identitas nasional yang seragam untuk seluruh warga negara Indonesia.

Pemberlakuan sanksi ini sementara diimplementasikan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya sub nasional dan juga identitas regional (Arifianto, 2008: 6). Begitu etnis minoritas kehilangan kepercayaan bahwa negara dapat mempromosikan nasionalisme kewarganegaraan, mereka kemudian menganggap negara sebagai badan mayoritas etnik dan karena itu tidak percaya bahwa ini adalah janji multi-budayais tentang status atau otonomi kepada etnis minoritas, akan tercapai.

Sehingga menyebabkan lemahnya nasionalisme sipil (Brown, 2001: 12). Hal ini diperburuk oleh keyakinan nasionalis sekuler bahwa penciptaan sebuah bangsa dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki pengalaman bersama, terlepas dari budaya, agama, dan latar belakang etnis mereka (Arifianto, 2008: 9).

Sejak kemerdekaan, sebagian besar provinsi telah terdorong untuk memberontak terhadap pemerintah pusat, apakah karena gerakan separatis menuntut pembagian kekuasaan yang sama atau menuntut kemerdekaan negara baru (Bowen: 155). Menyikapi perkembangan tadi, strategi politik Orde Baru yang ditetapkan berdasarkan model nasional dan selanjutnya ia menghilangkan gerakan etno-nasionalis.

Dalam praktik politik sehari-hari, model nasional dipaksakan pada ekonomi, birokrasi melalui eksistensi tentara melalui luar provinsi. Sistem pendidikan nasional yang umum dibuat, menjadikan bahasa Indonesia diwajibkan di setiap sekolah. Kebijakan ini direncanakan untuk mengubah provinsi-provinsi dan memasukkan mereka ke dalam negara Indonesia modern secara efektif (Bertrand, 2002: 23-4).

Menurut rezim otoriter Orde Baru, nasionalisme etno-kultural bergantung pada mitologi sejarah untuk menarik orang Jawa sebagai inti etnis, sementara perekrutan menjadi posisi elite pada tingkat tertentu, bergantung pada penjajahan. Banyak daerah di Indonesia menentang penggunaan simbol ini (Majapahit dan Sriwijaya), terutama mereka yang berasal dari kedua kerajaan Jawa kuno ini, dengan alasan bahwa memuliakan simbol ini dapat menyatukan integritas nasional dan menolak adanya kolonisasi non Sriwijaya dan Majapahit lainnya. (Kroef dalam Drake, 1992: 298).

Warga asli Indonesia dihadapkan oleh masalah persatuan nasional dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketidakseimbangan representasi kelompok etnis dalam aspek politik maupun distribusi ekonomi sejak kekalahan kolonial Belanda masih berlanjut (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 663).

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, naluri nasionalisme etno kembali

ada di setiap wilayah di Indonesia (Bertrand, 2002: 21). Model nasionalisme nasional telah gagal, karena keterasingan inklusi kelompok dalam model itu sendiri dan menolak identitas mereka serta mengikuti dengan membatasi budaya mereka juga.

Multi etnik menuntut pengakuan dari pemerintah pusat, dan dengan demikian tidak adanya pengakuan etnik dan budaya ini, mereka bermaksud untuk menekankan identitas etnik mereka dari mobilisasi dan pemisahan etno-nasionalis dari negara utama (Bertrand, 2002: 25). Kemudian konflik etnis mulai dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketegangan yang timbul dari artikulasi visi masyarakat nasional yang berlainan, dan berpotensi tidak sesuai (Brown, 2001: 6).

Mobilisasi dan kekerasan etno-nasionalis sering terjadi di negara transisi demokratis dimana kesepakatan sebelumnya mengenai model nasional belum disepakati. Definisi, wilayah dan agenda politik bangsa tetap tidak terdefinisi untuk menciptakan ketidakpastian tentang masuk dari kelompok atau istilah inklusi mereka (Bertrand, 2002: 2). Setelah tahun 1999 Indonesia masih ditantang oleh gerakan etno-nasionalis di Aceh dan Papua.

Para aktivis kemerdekaan di wilayah ini menekankan kembali gagasan bahwa mereka telah diintegrasikan secara paksa ke Indonesia menyusul eksploitasi ekonomi lokal Jakarta yang telah memperburuk situasi (Klinken, 2003: 126). Implikasinya adalah bahwa nasionalisme daerah, mengklaim bahwa warga daerah adalah orang-orang dengan satu kesamaan, seperti nasionalisme lainnya (Brown, 2004: 16), yang pantas membentuknya adalah negara merdeka sendiri.

Namun, negara yang ada akan selalu berusaha mencegah pemisahan diri, meski hal ini tidak dengan sendirinya menyebabkan daerahisme atau subnasionalisme etnis, menurun. Sebaliknya, mungkin penyangkalan tersebut mendorong gerakan separatist muncul, karena orang menyambut permintaan mereka untuk memiliki identitas teritorial kelompok mereka yang dijaga oleh pemerintah mereka sendiri di dalam negara mereka sendiri (Knight, 1982: 526).

Pada akhir abad ke-19, penjajah Belanda memberlakukan apa yang disebut sebagai "kebijakan etis" yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan posisi penduduk asli dalam sebuah pemerintahan kolonial. Gerakan nasionalis Indonesia muncul setelah bangkitnya gerakan nasionalis China daratan. Setelah perkembangan nasionalisme Indonesia pada tahun 1920, masyarakat adat mulai meluas penggunaan istilah "Indonesia", umumnya orang Indonesia Tionghoa tidak diperlakukan sebagai Indonesier (Bangsa Indonesia), karena istilah 'Bangsa Indonesia' memiliki indikasi untuk menggantikan istilah "bumiputra".

Meski menggunakan dua kata ini (Indonesier dan bumiputra) untuk membedakan status pribumi dengan orang Belanda dan orang Indonesia Tionghoa selama masa pra-independen. (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 668). Rakyat provinsi memutuskan untuk bersatu pada tahun 1920 untuk membangun sebuah negara dan negara baru sebagai respon terhadap kolonialisme (Lane, 2002).

Melalui kebijakan etis ini, Hindia Belanda kolonial telah berusaha untuk membagi orang-orang ke dalam kelompok aristokrat kelas bawah, menengah dan atas. Misalnya, Hindia Belanda mendesak masyarakat pedesaan untuk tetap menjadi petani, sebaliknya, anggota **kelas menengah dan atas** ditempatkan di posisi tinggi pegawai negeri. **Sebagian besar pegawai negeri** telah didominasi oleh mayoritas etnis Jawa, yang kemudian disebut kelas priyayi (Administrator).

Anggota keluarga bangsawan Jawa diberi fasilitas terbaik dan mendapatkan lebih banyak hak istimewa dari Belanda bila dibandingkan dengan warga biasa. Selain etnis Jawa, seperti orang Aceh, Minangkabau dan Bugis diperlakukan sebagai warga negara yang lebih rendah dan imigran. Proses kekhasan etnik terjadi di kalangan warga non-pribumi, orang Indonesia-Cina misalnya, di mana orang Belanda menunjuk orang Tionghoa untuknya adalah etnis dan masyarakat. Untuk ini, masyarakat Cina dilokasikan di wilayah khusus oleh kolonial Belanda (Siddique & Suryadinata, 1982: 66). Kebijakan etis ini juga berorientasi pada westernisasi elit keluarga aristokrat Jawa, terutama untuk menghindarinya dari pengaruh munculnya gerakan identitas Islam, yang dapat mendorong mereka untuk mengalahkan imperium kolonial Belanda, **oleh karena itu, Belanda** memberi kesempatan kepada aristokrat ini.

Keluarga untuk mendapatkan pendidikan gaya barat di universitas pendidikan yang disponsori Belanda. Dengan harapan, sebagai balasannya mereka dapat melakukan westernisasi, menasionalisasi dan mensekulerkan orang-orang Indonesia lainnya (Arifianto, 2008: 9). Tujuan kebijakan etis lainnya adalah proses migrasi.

Gagasan tentang migrasi etnis Jawa berasal dari Belanda, kerajaan kolonial memaksa migrasi Jawa secara massal ke luar Pulau Jawa, gerakan ini dimulai sejak tahun 1905. Selama masa pasca kemerdekaan, pemimpin Indonesia telah dipengaruhi untuk menerapkan strategi migrasi ini untuk menstabilkan ketidakseimbangan penduduk, karena Jawa sudah padat penduduknya.

Pada awalnya proses migrasi ini menunjukkan dampak positif bagi pencapaian ekonomi lokal dan regional, yang menjanjikan pendapatan baik bagi para migran kesejahteraan. Selain itu, pemerintah pusat memanfaatkan migrasi ini untuk mengamankan masalah

perbatasan dan keamanan negara (Drake, 1992: 307). Pada saat bersamaan memberikan dampak negatif, program migrasi ini menghidupkan kembali kekhasan etnis serta kesenjangan ekonomi.

Di mana para migran Jawa telah menduduki hampir semua sumber ekonomi lokal. Sebaliknya, kebijakan pemerintah pusat memiliki kecenderungan untuk melindungi kepentingan para migran daripada mempertimbangkan klaim etnis setempat. Pendudukan ekonomi ini hanya bisa dilakukan dengan kolusi migran Jawa dan juga militer Jawa Indonesia.

Kesimpulan dan Saran Jenis nasionalisme Indonesia ditetapkan berdasarkan modifikasi nasionalisme kewarganegaraan. Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada akhir Perang Dunia Kedua dan menjadikannya sebagai pondasi nasional sebagai pilar penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa dan cita-cita negara bangsa.

Pemimpin pendiri elit politik berpendapat bahwa wilayah yang melingkupi dengan bekas Hindia Belanda tidak memadai untuk meyakinkan integrasi nasional. Merasakan kurangnya kepercayaan persatuan nasional ini, para founding fathers mendasarkan negara baru pada nilai dan prinsip bersama yang ditujukan untuk pembentukan fondasi nasionalisme negara-negara yang baru.

Di mana nilai-nilai umum ini selanjutnya diindoktrinasi sebagai konsep dasar orang-orang Indonesia baru (Bertrand, 2002: 7-8). Pada saat berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda, Bumiputra/pribumi Indonesia masih memperdebatkan jenis nasionalisme apa yang harus diadopsi Indonesia. Setelah wacana panjang dan rumit, elit politik Indonesia sampai pada total visi negara, di mana orang harus menerima wilayah yang diputuskan oleh Indonesia.

Klaim perbatasan nasionalis sangat didasarkan pada kedaulatan unshared dan sentralisasi kekuasaan. Negara baru yang tampaknya mewarisi jalannya adalah kekaisaran kuno dari sistem pemerintahan Sriwijaya dan Majapahit yang bentuk kerajaannya digunakan oleh kedua kerajaan tersebut. (Kreuzer, 2004: 18). Muhammad Yamin adalah salah satu ide nasionalis yang paling penting, kuat dan besar di Indonesia, setelah Soekarno dan Hatta.

Yamin menegaskan bahwa negara baru tersebut harus terdiri dari tanah air Indonesia, yang mana, katanya, paling baru dianggap oleh negara Majapahit. Dan dengan demikian negara yang dia tegaskan, termasuk Sumatra, Jawa, Madura, the Lesser Sundas, Borneo, Celebes, the Moluccas, Semenanjung Malaya, Timor dan Papua. Selanjutnya gagasan ini didukung oleh Hatta (mantan wakil presiden Sukarno) dengan

mengklaim bahwa negara Indonesia yang wilayahnya sesuai dengan wilayah bekas Hindia Belanda (McIntyre, 1973: 81-82). Kawasan telah menjadi sub negara paling penting di jaringan politik Indonesia.

Banyak provinsi memiliki perspektif sosial dan politik yang berbeda. Hampir di semua provinsi terdiri lebih dari satu identitas etnik. Meski begitu, ada yang agak homogen, misalnya, Jawa Tengah, di mana kebudayaan Jawa paling maju, dan Sumatera barat, yang berasal dari masyarakat Minangkabau dan Sumatera Utara, yang mencakup Kesultanan Melayu tua termasuk masyarakat Batak dan Aceh yang berada di Sumatra.

Terdiri dari sejumlah masyarakat yang berbeda dan memiliki penguasa Kesultanan sendiri sebelumnya (Bowen, 2005: 155). Karena fragmentasi terbesar wilayah yang dimiliki Indonesia, konsep 'Greater Indonesia' digunakan oleh Sukarno sebagai nasionalisme Indonesia yang bertujuan untuk merumuskan kesatuan Indonesia (McIntyre, 1973: 78).

Dilema utama yang dihadapi negara baru ini adalah bagaimana menyatukan gagasan-gagasan yang berbeda dari sebuah negara besar dan padat penduduk dari begitu banyak sub kelompok etnik yang sedikit banyak dan berbeda dalam budaya, linguistik, dan agama (Ballard, 2008: 17). Meskipun, pada tahun 1928, Pemuda dari seluruh pulau berjanji untuk membangun satu negara, satu bahasa, dan satu negara - sebuah janji yang menjadi prinsip dasar bangsa dan negara.

Memang, pertempuran melawan penjajahan Belanda dalam bentuk Hindia Belanda adalah salah-satunya faktor pemersatu nyata yang menyebabkan pembentukan negara Indonesia (Wanandi, 2002: 136). Faktor terpenting lainnya kekuatan dominan dalam gerakan nasionalisme paling awal adalah faktor agama. Tapi pada berbagai titik di antaranya adalah sejarah, nasionalisme ini mengambil pendekatan konfrontatif dan agak negatif, terutama ketika mereka merasa dianiaya (Lanti, 2002: 2).

Sukarno memiliki bakat untuk menyatukan tradisi Jawa, Islam, dan versinya sendiri tentang Marxisme untuk mendapatkan banyak pengikut; Namun dia menganjurkan pembentukan sebuah negara sekuler dan bukan negara Islam (Ballard, 2008: 16). Belajar dari pengalaman Negara-negara di Balkan dan eks Uni Soviet, pemerintah dapat mengakomodir perbedaan yang menyeluruh di semua wilayahnya, dari Papua hingga Aceh, dengan cara menjadikan etnonasionalisme daerah sebagai kebenaran yang edukatif, sehingga etnis nasionalis daerah akan tertransformasi secara seiring berjalan waktu, imbas dari pada keikutsertaan pengayoman pemerintah pusat.

Pengayoman dapat berupa kebijakan nasional apapun terhadap daerah, kepedulian

Negara terhadap rakyat daerah selain dari pada otonomi daerah dan otonomi khusus. Nasionalisme raya hanya dapat tercapai dengan memfasilitasi etno-nasionalisme daerah. Dengan kata lain untuk menjadikan nasionalisme grater Indonesia tidak dibangun atas ajas ketakutan, kecurigaan terhadap suburnya etnis nasionalisme di daerah.

Aceh merupakan contoh dari revitalisasi etnonasionalisme hingga mengarah kepada nasionalisme Negara Kesatuan Indonesia. Sebesar apa penerimaan etno nasionalisme daerah oleh pemerintha pusat, maka akan sebesar itu pula rasa emosional etno-nasionalisme daerah terhadap nasionalisme raya Indonesia. Dalam era digital yang tanpa batas sekarang, memaksa Negara untuk senantiasa beradaptasi dengan perbedaan kultur dan lainnya yang ada di daerah.

Tidak jarang dilihat, untuk memadukan etnonasionalisme dan nasionalisme Negara terlibat yang nama Negara asing. Perdamaian Aceh dimana konflik yang berkepanjangan terjadi dapat diakiri dengan perundingan yang difasilitasi aktor luar. Pemerintah Indonesia dalam bentuk memorandum of understanding-nya dengan warga Aceh, telah menjembatani perbedaan nasionalisme antara RI dan Aceh dengan formasi Partai Lokal dan lainnya.

Ini merupakan embrio meghidupkan kembali rasa memiliki ke-Indonesiaan Aceh melalui demokrasi lokal yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga sampai saat ini, tujuan Aceh untuk merdeka dari ibu pertiwi tertransformasi kepada integrasi Aceh kepada Indonesia seutuhnya. Adapun dalam menghadapi dunia digital teknologi, pemerintah handaknya terus memberi peluang bagi Negara asing yang secara intensif ingin membantu perdamaian di tanah air, berlandaskan pengalaman Aceh, dimana sekarang masyarakat Aceh sudah merasa Indonesia adalah ibu pertiwi dan rasa cinta kepada NKRI semakin meningkat.

Perdamaian dalam arti yang menyeluruh, ekonomi, politik kepada daerah, sehingga daerah merasakan bagian dari integrasi Negara sehingga seiiring berjalan waktu terus mengarah kepada meningkat suburnya rasa nasionalisme terhadap NKRI. Referensi Aguswandi. Civil society: the missing peace of peace building. Retrieved from: <http://bib.cfc.dnd.ca/ipac20/ipac.jsp?session=1H39313W041G4.29427&profile=cfc&uri=link=3100016~!151629~!3100001~!3100002&aspect=subtab46&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=Peace-building+--+Japan.&index=SUBJECT>. Diakses tanggal 23 Maret 2016. Arifianto, Alexander R. 2008.

"Contesting the Nation: Competing Nationalisms in Indonesia" Paper presented at the annual meeting of the MPSA Annual National Conference, Palmer House Hotel, Hilton,

Chicago, IL Online <PDF>. 2009-05-23 from http://www.allacademic.com/meta/p268416_index.html. Diakses tanggal 24 Maret 2016.

Ballard, John B. 2008. *Triumph of Self-determination: operation stabilize and United Nations peace making in East Timor*. USA: Praeger Security International. Bertrand, Jacques. 2002.

National Models?, *Ethno nationalist Violence and Democratic Consolidation: an analysis of three ethno nationalist movements in Indonesia*" Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Boston Marriott Copley Place, Sheraton Boston & Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts Online <.PDF>. 2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p66407_index.html. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

Bowen, John R. 2005.

Normative pluralism in Indonesia: regions, religions, and ethnicity. <http://artsci.wustl.edu/~anthro/research/bowen/Normative%20Pluralism%20in%20Indonesia.pdf>. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

Bowen, John. 2007. *The new anthropology of ethnicity and identity and why it matters for Aceh and Indonesia*. First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies. By ARI, BRR. Singapore-Indonesia.

Braisted, William R. 1954. *Nationalism in Eastern Asia*.

Source: *The Journal of Modern History*, Vol. 26, No. 4 (Dec., 1954), pp. 356-363. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1876112>. Diakses tanggal 27 Maret 2016.

Brown, David. 2001. *Why might constructed nationalist and ethnic ideologies come into confrontation with each other? Working paper* series No. 17 (Nov., 2001).

Southeast Asia Research Centre (SEARC). City University of Hongkong. Calhoun, Craig. 1993. *Nationalism and ethnicity*. Source: *Annual Review of Sociology*, Vol. 19 (1993), pp. 211-239. Published by: Annual Reviews. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2083387>. Diakses tanggal 16 April 2016.

Chandra, Siddharth. 1999. *Colonial policy, wage inequality, and the birth of nationalism: the case of the Dutch East Indies*. http://eh.net/Clio/Conferences/ASSA/Jan_00/chandra.pdf.

Diakses tanggal 20 April 2016.

Drake, Christine. 1992. *National integration in China and Indonesia*. *Geographical Review*, Vol. 82, No. 3 (Jul., 1992), pp. 295-312. Published by American Geographical Society. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/215353>. Diakses tanggal 12 April 2016.

Egyankosh. *Some concepts: Imperialism, nationalism, fascism, Revolution*. Retrieved from: <http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/26167/1/Unit2.pdf>.

Diakses tanggal 17 April 2016 Hah, Chong-Do and Jeffrey Martin. 1975. Toward a Synthesis of conflict and integration theories of nationalism. Source: World Politics, Vol. 27, No. 3 (Apr., 1975), pp. 361-386. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2010125>.

Diakses tanggal 17 April 2016. He, Baogang and Anthony Reid. 2004. Special issue editor's introduction: four approaches to the Aceh question. Asian Ethnicity, Volume 15, Number 3, October 2004.

Taylor & Francis Ltd. DOI: 10.1080/1463136042000259752. Retrieved from: <http://www.chinesedemocratization.com/English%20Website/frame/materials/journal/english/HeReid.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2016. Heywood, Andrew. 2000. Key concepts in politics. New York: Palgrave Macmillan. Heywood, Andrew. 2007. Politics. New York: Palgrave Macmillan. Hoey, Brian A. 2003. Nationalism in Indonesia: building imagined and intentional communities through transmigration. Ethnology Vol.

42, No. 2. Spring 2003, pp. 109-26, c/o Department of Anthropology, The University of Pittsburg, Pittsburg PA 15260 USA. The University of Pittsburg.

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/39189/2/hoey_ethnology_2003.pdf.

Diakses tanggal 17 April 2016. Kingsbury, Damien. 2002. Interest, nations, and the state development: inability in archipelagic Southeast Asia.

<http://devnet.anu.edu.au/online%20versions%20pdfs/59/2059Kingsbury.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2016.

Klinken, Geery Van. 2003. Ethnicity in Indonesia. Retrieved from: <http://ssrn.com/abstract=1127126>. Diakses tanggal 19 April 2016.

Knight, David B. 1982. Identity and territory: Geographical perspectives on nationalism and regionalism. Source: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 72, No. 4 (Dec., 1982), pp. 514-531. Published by: Taylor & Francis, Ltd on behalf of the Association of American Geographers. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2563201>. 19 April 2016.

Kreuzer, Peter. 2004 "Framing Violence. The Role of Culture and State Institutions. Asian Perspectives" Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada Online <.PDF>.

2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p73554_index.html. 19 April 2016.

Lane, Max. 2002. Indonesia: when 'national unity' is no longer voluntary.

Green left weekly. Retrieved from: <http://www.greenleft.org.au/2002/497/28018>. 22 April

2016. Lanti, Irman G. 2002. How to secure Indonesia's cooperation in fight against militants. Retrieved from: <http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/IDSS012002.pdf>.

22 April 2016. Lawfield, Thomas. 2009. Nationalism in question. Retrieved from:

http://www.monitor.upeace.org/innerpg.cfm?id_article=654#_ftn22. 19 April 2016.
McIntyre, Angus.

1973. The greater Indonesia' idea of Nationalism in Malaya and Indonesia. Modern Asian Studies, Vol. 7, No. 1 (1973), pp. 75-83. Published by Cambridge University Press. Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/312037>. 19 April 2016. Plato. 2001. Nationalism. Retrieved from: <http://plato.Stanford.edu/entries/nationalism>. Siddique, Sharon and Leo Suryadinata. 1981-1982. Bumiputra and pribumi: economic nationalism (indiginism) in Malaysia and Indonesia.

Published by Pacific affairs, University of British Columbia. Vol. 54, No. 4 (1981-1982), pp. 662-687. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2757890>. Diakses tanggal 19 April 2016. Smith, Anthony D. 1996. Culture, community and territory: the politics of ethnicity and nationalism. Source: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 72, No. 3. Ethnicity and International Relations (Jul., 1996), pp. 445-458.

Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2625550>. Diakses tanggal 23 April 2016. Smith, Dan. 2000. Ethical uncertainties of nationalism. Source: Journal of Peace Research, Vol. 37, No. 4, Special Issue on Ethnicity of War and Peace (Jul., 2000), pp. 489-502. Published by: Sage Publication, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/424643>.

Diakses tanggal 23 April 2016. Smith, Mike. (2009). Understanding nationalism. www.globalpolitician.com. Spykman, Nicholas J. 1926. The social background of Asiatic nationalism. Source: The American Journal of Sociology, Vol. 32, No. 3 (Nov., 1926), pp. 396-411. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2765541>. Diakses tanggal 12 April 2016. Tamir, Yael. 1995.

Review work(s): Imagined communities by Benedict Anderson. Nationalism: Five roads to modernity by Liah Greenfeld. National identity by Anthony D. Smith. Source : World Politics, Vol. 47, No. 3 (Apr., 1995), pp. 418-440. Published by: The Johns Hopkins University Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2950694>. Diakses tanggal 19 April 2016. Turner, Mark. 2005.

From centralized authoritarianism to decentralized democracy: regional autonomy and the state in Indonesia in Marc Weller and Stefan Wolff (Eds.), autonomy, self-government and conflict resolution: innovative approaches to institutional design in divided societies. New York: Routledge. Vandenbosch, Amry. 1952. Nationalisma and religion in Indonesia. Source: Far Eastern Survey, Vol. 21, No. 18 (Dec. 17, 1952), pp. 181-185. Published by: Institute of Pacific Relations.

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3023866>. Diakses tanggal 19 April 2016.
Wanandi, Jusuf. 2000. *Indonesia: a failed state?* The Washington Quarterly, summer 2002, pp. 135-146. By The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from:
<http://www.twq.com/02summer/wanandi.pdf>.

Diakses tanggal 12 April 2016. Weatherbee, Donald A. 2002. *Indonesia: political drift and state decay*. Retrieved from:
<http://www.watsoninstitute.org/bjwa/archive/9.1/Indonesia/Weatherbee.pdf>. Diakses tanggal 19 April 2016. Author's Biography: Penulis lahir di kota Langsa, tahun 1978. Salah seorang staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe Aceh.

Telah menyelesaikan pendidikan strata satu formalnya pada jurusan ilmu politik dari universitas Aligarh Muslim University (AMU-India) tahun 1998, selanjutnya melanjutkan program magister ilmu hubungan internasional di Bangalore University-India pada tahun 2002. Pada tahun 2007, penulis berkesempatan mengikuti program resolusi konflik di universitas Oxford (Inggris).

Sekarang masih sebagai kandidat Doktor Komunikasi politik Islam di UIN Sumatera Utara. Adapaun tulisan yang sudah dipublikasi baik di Media Koran maupun Jurnal adalah *The Role CMI in Solving Indonesia-Aceh Conflict, Should Ambalat War ?, Fuel Politic and Rupiah's Destiny, Civil-Military Relation in Aceh, Local Otonomy in, The Perspective of International Relation, Hindus-Muslim Conflict in India, Close Relation among Imperialism, Oreintalism and Missionarism, The Role of Muslim Woven in The Parliament (Indonesia Case), The Effectiveness of Prosperity Social Development (North Aceh Case)*.

Selanjutnya buku penulis yang baru terbit berjudul *Pembangunan Masyarakat Kumuh Berbasis Sustainable Development: Studi Kasus Pemukiman Kumuh Kota Lhokseumawe*. Penulis sangat interest di Bidang politik Islam, pemerintahan, NGO, Hubungan Internasional, Diplomasi dan Perdamaian.

INTERNET SOURCES:

- <1% - <https://www.facebook.com/journaljiis>
- <1% - https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Bigliardi
- <1% - <https://budaya.wordpress.com/2011/>
- <1% -

<http://arine-s.blogspot.com/2014/10/skripsi-pengaruh-asi-dalam-pembentukan.html>
<1% -
<https://www.scribd.com/doc/45659656/Soekarno-Dan-Konfontasi-Indonesia-Malaysia>
<1% -
<https://es.scribd.com/doc/48079167/MAKALAH-SEJARAH-TENTANG-SEJARAH-NASION ALISME>
<1% -
<http://karinasetyowati.blogspot.com/2008/06/upaya-penyelesaian-konflik-etnis-di-sri.html>
<1% - <http://luwesagustina.blogspot.com/2010/11/materi-interaksi-sosial.html>
<1% -
<https://abineoagus.wordpress.com/2010/10/27/perjuangan-untuk-menyelamatkan-kehidupan-di-dunia/>
<1% - <http://bondstravolta.blogspot.com/2011/12/sejarah-nusantara-indonesia.html>
<1% -
<https://www.patachu.com/2017/07/10/gambia-the-abad-kesembilan-belas-untuk-kemerdekaan/>
<1% - <https://to25rin.wordpress.com/category/negara-asean/page/2/>
<1% - <https://dodogusmao.wordpress.com/2009/05/14/undang-undang-timor-leste/>
<1% -
<http://friscaputikasari.blogspot.co.id/2014/09/makalah-sejarah-perang-dunia-1.html>
<1% - <https://duniaesai.wordpress.com/page/2/>
<1% - <http://www.tionghoa.info/9-sebutan-dan-tipe-keturunan-tionghoa-di-indonesia/>
<1% - <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/08/23/masihkah-ada-hari-esok/>
<1% - <https://www.scribd.com/document/220530567/Materi-Kuliah-Ilmu-Sejarah>
<1% -
<https://www.scribd.com/document/66345558/NEGARA-DAN-WARGA-NEGARA-INDONESIA>
<1% -
<https://teknikkombsi.blogspot.co.id/2015/04/1313-penjelasan-lengkap-negara-dan.html>
<1% -
<http://rusdyzanky.blogspot.com/2014/12/ideologi-ideologi-berpengaruh-di-dunia.html>
<1% -
<http://muntasircivil.blogspot.com/2013/11/makalah-pendidikan-kewarganegaraan-dan.html>
<1% -
<http://historyfileon.blogspot.co.id/2016/02/hubungan-paham-paham-besar-dunia-dengan.html>
<1% - <http://lidahtidakbertulang.blogspot.co.id/2013/09/nasionalisme.html>
<1% -

<https://modul.mercubuana.ac.id/PT1nTXRNRE13QVRP/Cuntoko+-+Kewarganegaraan+%5B90003%5D%7CModul+Kewarganegaraan+%5BTM2%5D.doc>
<1% - <http://sabda.org/artikel/book/export/html/21>
<1% - <http://shahanandaselly.blogspot.com/>
<1% - <https://www.scribd.com/document/348852705/kekuatan-politik>
<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin
<1% - https://maradana.files.wordpress.com/2011/12/m1_nopw.pdf
<1% -
<https://masudumar.wordpress.com/2013/01/28/persamaan-kedudukan-warga-negara-dalam-berbagai-aspek-kehidupan-2/>
<1% -
<http://jati-rinakriatmaja.blogspot.com/2015/05/teori-kognitif-sosial-albert-bandura.html>
<1% - <https://www.scribd.com/doc/130472518/asia-selatan>
<1% -
http://www.academia.edu/1845394/_UNITED_CULTURE_ALA_CINTA_LAURA_SEKOLAH_I_NTERNASIONAL_IDENTITAS_DAN_POSTMODERNISM
<1% -
<https://www.scribd.com/doc/45676779/Nasionalisme-Konflik-Etnis-dan-Demokrasi>
<1% -
<http://zadandunia.blogspot.com/2015/06/quo-vadiskaum-sekuler-dan-kaum-anti.html>
<1% -
<https://strez.wordpress.com/buku-blog-gratis-anticopyright/dalih-pembunuhan-massal/penjelasan-tentang-g-30-s/>
<1% -
<https://bagiilmunei.blogspot.co.id/2017/08/contoh-kasus-penyimpangan-nilai-nilai.html>
<1% -
<https://www.scribd.com/document/345080314/Makalah-Kewarganegaraan-Identitas-Nasional-docx>
<1% -
<http://putratosora.blogspot.com/2012/01/nasionalisme-dalam-perspektif-islam.html>
<1% - <https://bkpemula.wordpress.com/page/4/>
<1% -
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1026688-hampir-seluruh-wilayah-indonesia-terancam-puting-beliung>
<1% - https://issuu.com/tifaoundation/docs/buku_sumber_hak_atas_kebebasan_bera
<1% - <https://danielpinem.wordpress.com/pemikiran-indonesia-juli-2007-2/>
<1% - <http://aldialpa.blogspot.com/>
<1% -
http://www.academia.edu/24712258/PARTAI_POLITIK_SEBAGAI_KEKUATAN_POLITIK_DI_INDONESIA_PADA_MASA_PEMERINTAHAN_ORDE_REFORMASI

<1% - <https://dewinrplb.wordpress.com/2016/03/13/sistem-pendidikan-di-singapura/>
 <1% - <https://danielpinem.wordpress.com/pemikiran-indonesia-april-2007-1/>
 <1% -
<https://www.scribd.com/document/334021323/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan-pdf>
 <1% - <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2012/02/page/38/>
 <1% - <https://elitasuratmi.wordpress.com/page/5/>
 <1% - <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/category/sejarah/page/47/>
 <1% - <http://serpihandalamkertas.blogspot.com/2015/03/pergerakan-nasional.html>
 <1% -
<http://semutuyet.blogspot.com/2012/03/fungsi-dan-peranan-pendidikan-dalam.html>
 <1% - http://www.academia.edu/12744859/MASALAH_REFORMASI_BIROKRASI
 <1% -
<https://murdilalu.wordpress.com/2012/04/18/disintegrasi-dan-jalan-menuju-integrasi-nasional-di-indonesia/>
 <1% - <https://ace-informasibudaya.blogspot.com/feeds/posts/default>
 <1% - <http://abunawa.blogspot.co.id/2015/10/pengaruh-bangsa-barat-terhadap.html>
 <1% -
<http://wartasejarah.blogspot.com/2015/06/perbandingan-pendidikan-di-negara.html>
 <1% - <https://islamadalrahmah.blogspot.com/feeds/posts/default>
 <1% - <https://www.kuybelajar.net/2017/05/tujuan-dan-cita-cita-bangsa-indonesia.html>
 <1% - <https://basyarat.wordpress.com/2011/02/07/etnisitas-dalam-eksistensi-negara/>
 <1% - <http://klik-bucex.blogspot.co.id/2013/01/sejarah-kerajaan-hindu-budha-di.html>
 <1% - <https://pramukasmpnsaka.wordpress.com/2011/02/05/syarat-sku-bantara/>
 <1% -
<http://rifanmadani16.blogspot.com/2013/03/detik-detik-proklamasi-saat-saat.html>
 <1% - <https://bukubiruku.com/keragaman-budaya-indonesia/>
 <1% -
<https://litaniaager.wordpress.com/2011/07/29/perlawanan-gerakan-islam-terhadap-penjajahan-belanda/>
 <1% -
<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2016/01/20/nilai-nilai-agama-dan-budayasebagai-fundamen-kehidupan-bangsa/>
 <1% -
<https://teknologikinerja.wordpress.com/2010/03/11/pemanfaatan-ict-dalam-pendidikan/>
 <1% - <https://abusulaiman21.wordpress.com/category/tak-berkategori/page/2/>
 <1% - http://www.lib.fcu.edu.tw/res_edb_guide/mylibrary/MIL4690_list.xls
 <1% - <https://www.lrd.ethz.ch/index.php/lrd/article/viewArticle/lrd-2009-1/7>
 <1% - https://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-08/apsa-1aa082108.php

<1% -

http://anthropology.artsci.wustl.edu/files/anthropology/imce/Bowen-Normative_Pluralism_in_Indonesia.pdf

<1% - <https://millanaviza.wordpress.com/>

<1% - <http://www.geocities.ws/bouviersmith/ref/conflict.htm>

<1% - http://cliometrics.org/conferences/ASSA/Jan_00/

<1% - <https://es.scribd.com/doc/316073458/Prosiding-Semnas-Tekno-Altek-2016>

<1% -

http://lib5.leeds.ac.uk/rlists/broker/index.php?bbModuleId=201617_30857_PIED2403&bListId=_4629423_1

<1% -

<https://www.scribd.com/document/367815105/Upaya-Pencegahan-Dan-Deteksi-Dini-CA-Mamae>

<1% - <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002088170804500202>

<1% - [http://users.telenet.be/vze/bachelorpaper/Artikels/Knight\(D.\)..pdf](http://users.telenet.be/vze/bachelorpaper/Artikels/Knight(D.)..pdf)

<1% - <http://explore.tandfonline.com/content/est/tcri-ciob-members-free-access>

<1% - [https://broom02.revolvy.com/topic/Security%20Studies%20\(journal\)](https://broom02.revolvy.com/topic/Security%20Studies%20(journal))

<1% - <http://www.jstor.org/stable/i213717>

<1% - http://www.hawaii.edu/asiaref/seasia/sub_islam.htm

<1% -

[http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/\(ISSN\)1468-2346/homepage/10._Democratization_and_Russian_Foreign_Policy_Malcolm_Pravda_Jul1996.pdf](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2346/homepage/10._Democratization_and_Russian_Foreign_Policy_Malcolm_Pravda_Jul1996.pdf)

<1% - <https://www.jstor.org/stable/i328707>

<1% - <http://www.nationalismproject.org/journals/world.htm>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64187/Reference.pdf;sequence=2>

<1% -

https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Wolff2/publication/242218065_Autonomy_Self-Governance_and_Conflict_Resolution_Innovative_Approaches_to_Institutional_Design_in_Divided_Societies/links/00463529f23377651d000000.pdf?inViewer=true&pdfJsDownload=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail

<1% - <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9256.2004.00217.x>

<1% -

<https://www.encyclopedia.com/finance/finance-and-accounting-magazines/agency-theory>

<1% - <http://top.hatnote.com/id/wikipedia/2016/7/12.html>

<1% - http://www.unsyiah.ac.id/faculty-and-staff?Fsd_page=12&Fsd_sort=unit_kerja

<1% -

<http://www.feb.ui.ac.id/global-network-weeks-2017-women-and-digital-entrepreneurship>

p/

<1% -

<http://elshamnewsservice.blogspot.co.id/2010/05/12-tahun-penegakan-hak-asasi-manusia-di.html>

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Internasional_Indonesia